

**PELAKSANAAN PROGRAM MUSREMBANG DESA DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Study Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Gas Alam Kecamatan Muara
Badak Kabupaten Kutai Kartanegara)**

Asral Al Amin¹

Abstrak

Asral Al Amin, Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara). Di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si dan Bapak Drs. M. Z. Arifin, M.Si.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program musrembang desa alam perencanaan pembangunan desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pembangunan semenisasi jalan desa, pembangunan jembatan desa, pembuatan sumur bor terpadu, dan pembuatan drainase yang dirumuskan melalui Musrembang Desa dan di tuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Metode penelitian dengan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis, dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian ditetapkan adalah semenisasi jalan desa, pembuatan jembatan desa, pembuatan sumur bor terpadu, dan pembuatan drainase desa.

Sumber data diambil dari key informen yang berkompeten, yakni Kepada Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan informen lainnya seperti Sekertaris Desa Gas Alam, Kepala Dusun Badak 1 dan Kepala Dusun Badak 14 Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data digunakan medel interaktif yang di kembangkan Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program musrembang desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan dengan baik, meski beberapa faktor jadi penghambat pelaksanaan pembangunan desa, salah satunya kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana kontraktor dengan pihak Pemerintah Desa Gas Alam.

***Kata kunci : Pelaksanaan Program Musrembang, Perencanaan Pembangunan
Desa***

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : alaminasral87@yahoo.com

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang terkandung di dalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Pemusyawaratan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dapat membuat rancangan perencanaan pembangunan desa yang secara bersama-sama dengan masyarakat desa ditetapkan menjadi Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam hal ini, Musrembang sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi pembangunan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan program Musrembang Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang Desa) pada tahun 2014 hal ini terlihat melalui infrastruktur yang masih banyak di benahi ulang pada Musrembang tahun ini di antaranya proyek semenisasi jalan desa, perbaikan jembatan desa, pembuatan sumur bor terpadu dan pembuatan drainase desa yang sampai saat ini pelaksanaannya masih tertunda dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan desa (Studi tentang proyek desa melalui APBD di desa gas alam kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka upaya yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menanggapi permasalahan yang menyangkut pembangunan desa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Musrembang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Program Musrembang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

KERANGKA DASAR TEORI

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Secara sederhana, pelaksanaan bisa juga disebut sebagai implementasi. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Musrembang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrembang dilakukan setiap Bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Payung hukum pelaksanaan Musrembang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara

teknis pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 1 di jelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa), Alokasi Anggaran Desa (ADD), Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Program Musrembang Desa Draft Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Tim Penyusun Draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan. Pedoman utama yang akan digunakan sebagai dasar adalah RPJM Desa. Dengan demikian, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM Desa. Adapun program pembangunan desa gas alam yang dibahas dalam Musrembang desa sebagai berikut:

1. Semenisasi jalan desa
2. Perbaikan Jembatan desa
3. Pembuatan sumur bor terpadu
4. Pembuatan drainase desa

Perencanaan

Menurut Iwan Nugroho (2012:08), perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksi (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam persepektif kepentingan orang banyak atau publik. Di dalam perencanaan, oleh karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa diizinkan terjadi perubahan-perubahan dalam rangka menuju atau mendekati ide yang lebih baik.

Menurut Sjafrizal (2009: 15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Pembangunan

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang Subandi (2011:9-11).

Menurut Sondang P.Siagian (2005:4-5), Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut Soekanto (2005:437), Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubanh, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri

adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Dari pendapat ahli di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan yang hendak dicapai oleh masyarakat kearah yang lebih baik melalui proses terencana.

Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Rahardjo Adisasmita, 2006:3).

Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita (2006:20), Pembangunan desa yang dilakukan dengan pendekatan multi sektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras dan senergis sehingga tercapai optimalitas.

Dari pendapat ahli diatas tentang pembangunan desa, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan rangkaian kegiatan dalam usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada lingkungan desa untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan hasil Musrebang Desa yang di susun dalam draf Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang digunakan sebagai dasar RPJM Desa. Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai kegiatan di bidang infrastruktur yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa dalam bentuk pembangunan fisik dalam hal penyediaan fasilitas baik berupa semenisasi jalan desa, pembuatan sumur bor, dan pembangunan drainase serta bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi pada lingkungan desa untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan taraf kesejahtraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Whitney (dalam Kaelan 2005:58) mengatakan bahwa “metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada adalah:

1. Pelaksanaan Program Musrebang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. Semenisasi jalan desa.
 - b. Pembangunan jembatan desa.

- c. Pembangunan pembuatan sumur bor terpadu.
- d. Pembangunan dreinase desa.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Musrebang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder :

1. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pengamatan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informen dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan.
2. Data Sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung. Atau data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, berupa:
 - a. Dukumen atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan informen dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Accidental Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal tentang apa yang hendak diteliti, diaman pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power* atau otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Dengan demikian maka yang menjadi informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* ini adalah:

- a. *Key Informen* (Informasi Kunci) : H. Moh. Hidayat selaku Kepala Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Informan yaitu masyarakat umum yang menggunakan fasilitas infrastruktur pembangunan desa (*Accidental Sampling*)

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (Library Research)
2. Penelitian Lapangan (Field Work Reserch)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Kuesioner
 - d. Dokumentasi

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Gas Alam Jl. Rahmat Badak I Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Tekhnik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milas dan Michael

Huberman yang dikutip oleh Basrowi dan Suswandi (2008:209) bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu peneliti.
2. Penyederhanaan Data (*data reduction*)
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengebstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.
3. Penyajian Data (*data display*)
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Muara Badak

Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara geografis, Kecamatan Muara Badak terletak antara 117^o 07' – 117^o 32' Bujur Timur dan 0011'-00 31' Lintang Selatan dengan luas wilayah 939,09 km².

Secara administratif, Kecamatan Muara Badak berbatasan dengan:

Sebelah utara	: Kecamatan Marang Kayu
Sebelah timur	: Selat Makassar
Sebelah selatan	: Kecamatan Anggana dan Kota Samarinda
Sebelah barat	: Kecamatan Tenggarong Seberang

Wilayah Kecamatan Muara Badak terdiri dari 13 desa, diantaranya Desa Seliki, Desa Salo Palai, Desa Muara Badak Ulu, Desa Muara Badak Ilir, Desa Tanjung Limau, Desa Tanah Datar, Desa Badak Baru, Desa Suka Damai, Desa Gas Alam Badak Satu, Desa Batu-Batu, Desa Badak Mekar, Desa Salo Cella dan Desa Sungai Bawang.

Kondisi Demografi

Desa Gas Alam secara administratif terbagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun 14 dan Dusun Dadak 1 dengan luas wilayah 480ha/m². Dimana Desa Gas Alam sebagian besar adalah wilayah dataran rendah dan selebihnya adalah perbukitan atau lereng gunung. Letak Desa Gas Alam adalah 320 meter dari permukaan laut, sementara iklim di Desa Gas Alam sebagaimana iklim di desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan hujan, namun musim hujan lebih dominan daripada musim kemarau. Jarak dari Desa Gas Alam menuju kecamatan yaitu 9 km dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit, jarak ke ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yaitu 65 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Desa Gas

Alam memiliki potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk 6,230 Jiwa dari 28 RT dengan 1,791 Kepala Keluarga (KK).

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan seperti pada bagian sebelumnya bagian ini merupakan rangkaian dari penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi mengenai Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pelaksanaan Program Musrembang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan program musrembang desa yang ada di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara di atur dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang pembahasannya di laksanakan pada forum musrembang desa, pada forum ini puluh program pembangunan di rumuskan di antaranya:

a. Semenisasi Jalan Desa

Jalan sebagai sarana penghubung di bidang transportasi darat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat, selain itu prasarana jalan pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, budaya maupun ketahanan dan keamanan.

Prasarana jalan juga dipandang sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/ peningkatan pembangunan dan mendorong serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah/ daerah. Hal tersebut berangkat dari pemikiran adanya kondisi wilayah/daerah yang berbeda, dalam hal ini penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi.

Memperhatikan luas wilayah Desa Muara Badak Kabupaten kutai Kartanegara dan jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya sarana jalan yang berperang sebagai pendorong pengembangan dan pembangunan diberbagai sektor.

b. Pembangunan Jembatan Desa

Pembangunan jembatan desa merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat Desa Gas Alam mengingat kondisi alamnya sebagian besar merupakan dataran rendah, sehingga perlu untuk pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan antara RT yang satu dengan RT yang lainnya. Selain itu pembangunan jembatan desa di harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan desa gas alam dan dapat mengurangi tingkat pengangguran, namun proses pembangunan infrastruktur jembatan desa ini belum sepenuhnya dapat di nikmati oleh masyarakat desa gas alam mengingat pembangunan yang sudah ada saat ini belum semuanya terialisasi.

c. Pembangunan Sumur Bor Terpadu

Air merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki dan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk pribadi dan lingkungan yang sehat, keberadaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk kegiatan, mandi, mencuci dan MCK. Penduduk Desa Gas Alam mengkonsumsi

air dari sumur bor yang telah di bangun di setiap RT namun dalam proses pembangunannya tidak semuanya menghasilkan air yang layak di konsumsi di karenakan kadar garam yang ada cukup tinggi, sehingga air yang ada hanya sebatas untuk kebutuhan MCK. Untuk saat ini Penduduk Desa Gas Alam mendapatkan air bersi melalui sumur bor terpadu yang pengeborannya melibatkan perusahaan Vico.

d. Pembuatan Drainase Desa

Pembangunan drainase desa merupakan hal yang sangat penting mengingat kondisi alam yang ada di desa gas alam merupakan dataran rendah, selain itu air laut yang pasang seringkali membuat genangan air di halaman pemukiman penduduk sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, desa gas alam dulunya merupakan desa yang tinggi demam berdarah berangkat dari persoalan inilah pemerintah desa gas alam bersama dengan jajaranya melakukan trobosan-trobosan terutama pada perbaikan lingkungan namun perbaikan lingkungan yang ada saat ini belum semuanya dapat teralisasi dengan baik masih banyak persoalan pembangunan terutama pada pembuatan drainase desa gas alam yang belum terselesaikan.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu faktor penghambat selama ini karena kurangnya komunikasi antara tim lapangan yang di bentuk oleh pemerintah desa gas alam dengan masyarakat yang mempunyai lahan untuk di lewati proyek pembangunan desa.

Selain itu faktor penghambat yang lainnya berkaitan dengan kondisi alam yang ada di desa gas alam, di mana letak wilayah desa gas alam berada pada dataran rendah dan dekat dengan permukaan laut sehingga apabila air laut pasang membuat genangan di permukiman warga.

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi seperti yang sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari suatu penelitian untuk mengetahui gambaran yang terjadi mengenai Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara) yaitu, semenisasi Jalan Desa, perbaikan jembatan desa, pembuatan sumur bor terpadu, pembuatan drainase desa dan faktor penghambat Pelaksanaan Program Musrebang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan program musrebang desa yang ada di lingkungan Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) hal ini terlihat pada infrastruktur pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa di antaranya:

a. Semenisasi Jalan Desa

Semenisasi jalan desa pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya perekonomian masyarakat serta menjadi penghubung antara desa yang satu dengan desa yang lainya tentunya berdampak padak perkembangan ekonomi dan kurannya angka pengangguran.

Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah daerah terutama pemerintah desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada dipedesaan. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,peningkatankualitas hidup, peningkatan mobilitas barang.

Disisi lain, kegiatan pembangunan infrastruktur jalan ini juga mempunyai potensi yang besar untuk menimbulkan dampak lingkungan yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat setempat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini akan terbentuknya pembuatan jalan utama, pembuatan saluran-saluran air dan cabang-cabang jalan sebagai pematokan lahan.

b. Pembangunan Jembatan Desa

Pembangunan jembatan desa merupakan hal yang sangat penting di karnakan dapat memantapkan kestabilan sarana perhubungan lalu lintas angkutan darat bagi pembangunan Desa Gas Alam khususnya dan nasional umumnya, sebagai perwujudan nyata terhadap pelayanan jasa distribusi yang meliputi jasa angkutan, jasa perdagangan dan pergerakan dari manusianya sendiri juga sebagai sarana yang menghubungkan dengan daerah lain yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu sistem jaringan jalan dan jembatan yang merupakan hal utama untuk dijaga kemampuan daya layanannya.

Jembatan yang merupakan bagian dari jalan sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang akan menunjang lancarnya roda perekonomian Desa Gas Alam di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan dan rehabilitasi perlu diperhatikan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga pembangunan jembatan dapat mencapai sasaran umur jembatan yang direncanakan.

c. Pembangunan Sumur Bor Terpadu

Air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung dengan air demi mempertahankan hidupnya. Air yang digunakan untuk konsumsi sehari -hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Kualitas air bersih dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Namun kualitas air yang baik ini tidak selamanya tersedia di alam sehingga diperlukan upaya perbaikan, baik itu secara sederhana maupun modern. Jika air yang digunakan belum memenuhi standar kualitas air bersih, akibatnya akan menimbulkan masalah lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya.

d. Pembuatan Drainase Desa

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan desa/kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Menurut Suripin (2004), drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir (Suripin, 2004).

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat atau penghalang sehingga target yang hendak dicapai cenderung terlambat, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tak lain karena kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak pelaksana program pembangunan baik dari pihak kontraktor maupun pihak masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan berkaitan dengan kurangnya respon masyarakat terkait dengan akses lahan yang di lewati proyek pembangunan dan kondisi geografis Desa Gas Alam itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Program Musrebang Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Musrebang Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gas Alam Kecamatan Maura Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada dasarnya pelaksanaan program musrebang yang ada di Desa Gas Alam sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hal ini terlihat dari pelaksanaan program:
 - a. Semenisasi Jalan Desa oleh Pemerintah Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara:
Semenisasi jalan desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat sehingga ada beberapa wilayah jalan yang memang pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang di tentukan dalam musyawarah perencanaan

- pembangunan desa (Musrebang Desa), ini dikarenakan pembangunan jalan desa di bangun oleh pihak kontraktor sehingga campur tangan masyarakat tidak ada.
- b. Pembuatan Jembatan oleh Pemerintah Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara:
Pembangunan dan perbaikan jembatan desa belum sepenuhnya sesuai dengan RKP ini terlihat dengan banyaknya proyek pembangunan namun tidak di imbangi dengan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan jembatan masih ada yang belum terselesaikan. Selain itu kondisi wilayah desa gas alam yang berada di tepi laut membuat gelombang air pasang yang sering kali menghantam jembatan sehingga mengakibatkan kerusakan jembatan tersebut.
 - c. Pembuatan Sumur Bor Terpadu di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara:
Fasilitas Pembangunan sumur bor terpadu oleh pemerintah desa di upayakan ada enam zona namun yang ada di desa gas alam saat ini hanya ada satu zona sumber air bersih yang dapat di konsumsi oleh masyarakat Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu kondisi alam yang ada di desa gas alam merupakan faktor utama sulitnya mendapatkan air yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan sehingga di perlukan peralatan pengobaran yang besar dan mempunyai ketahanan yang kuat untuk bisa menghasilkan air yang bersih dan bisa di konsumsi.
 - d. Pembuatan Drainase di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara:
Pembuatan drainase di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya persoalan komunikasi antara tim lapangan yang di buat oleh pemerintah desa dengan pihak warga yang lahannya di lewati proyek pembanguna, selain itu hal serupa juga yang terjadi dengan pihak kontraktor yang mendapatkan proyek tersebut.
Secara administratif pemerintah Desa Gas Alam sudah berupaya untuk bekerja secara maksimal namun tim yang di bentuk oleh pemerintah desa belum bekerja secara maksimal, sehingga perlu kedepannya untuk di adakan seleksi pembentukan tim lapangan bagi masyarakat maupun warga yang ada di lingkungan Desa Gas Alam.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program musrebang desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara:
Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program musrebang desa terkait dengan proses pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Di antaranya kurangnya jalinan komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak pengusaha swasta, kurangnya respon masyarakat terkait dengan pembangunan fasilitas drainase dan kondisi geografis Desa Gas Alam itu sendiri.

Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, penelitian akan menyampaikan beberapa saran yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program-program

pembangunan Pemerintah Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa dan dapat di jadikan refrensi bagi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Muara Badak.

1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa

Dalam pelaksanaan program pembangunan semenisasi jalan desa di upayakan adanya campur tangan masyarakat dan koordinasi dengan pihak kontraktor maupun lembaga kemasyarakatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Gas Alam, agar nantinya pembangunan yang di harapkan dapat di rasakan oleh masyarakat.

2. Pembuatan Jembatan

Disarankan dalam perumusan dan perencanaan pembangunan di sesuaikan dengan anggaran yang ada di dana alokasi desa (ADD) sehinnnga program pembangunan tidak mengalami keterlambatan, selain itu juga program pembangunan dan perbaikan jembatan desa harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan tentunya secara kualitas jematang harus di tingkatkan agar gelombang air laut yang menghantam jembatan tersebut tidak mudah rusak.

3. Pembuatan Sumur Bor Terpadu

Kemudian, disarankan agar Pemerintah Desa Gas Alam untuk melanjutkan pembuatan sumur bor terpadu sesuai dengan zona-zona yang telah di rencanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) agar masyarakat dapat menikmati air bersih dan tidak kekurangan, selain itu juga di sarangkan agar Pemerintah Desa Gas Alam bekerja sama dengan perusahaan Vico dalam hal peminjaman peralatan atau pengajuan anggaran untuk pembelian peralatan mesin bor yang mempunyai ketahanan dan kekuatan yang kuat guna untuk proses pembuatan sumur bor terpadu.

4. Pembuatan Drainase

Disarankan agar dalam proses pembuatan drainase desa Pemerintah Desa Gas Alam dalam pembentukan tim lapangan melalui jalur seleksi, sehingga persoalan yang ada di masyarakat dapat di sampaikan ke Pemerintah Desa hal ini agar menjaga kemungkinan komunikasi yang tidak tersampaikan dari masyarakat ke Pemerintah Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.
- Lexy J., Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan. 2012. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: LP3ES.
- P. Siagian, Sondang, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rostow, W.W, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rochajat, dkk. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosia*. Rajawali Pers.

- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance: Pemerintahan yang baik baigian dua*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, Edisi Baru.
- Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- _____ 2012. *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D*. Dandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang : Baduose media.
- Subandi .2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Alfabeta.
- Tjokrowinoto. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka.
- Usman, dan Akbar. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wrihantnolo, dan Dwidjiwinoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, sebuah Pengantar dan Panduan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Dokumen-dokumen

- Anonim Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- _____ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- _____ Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- _____ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 *Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*.

